

Kejati Dukung Polisi Tangani 'Duit Raib'

■ Bowo Pribadi

SEMARANG — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Tengah akhirnya menyerahkan penanganan kasus 'raibnya' uang kas daerah Pemerintah Kota Semarang ke Polrestabes. Jajaran Polrestabes Semarang pun memang tengah mengusut ketidakjelasan dana pemkot senilai Rp 22 miliar yang diklaim disimpan di Bank Tabungan Pensiun Nasional (BTPN) itu.

"Kami *kan* sama-sama penegak hukum, Polrestabes silakan menanganinya," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Hartadi di Semarang, Senin (23/3). Meskipun kasus tersebut ditangani kepolisian, menurut dia, muaranya nanti tetap ke kejaksaan saat tahap penuntutan.

Hartadi mengatakan, lembaga nya siap memberikan dukungan data kepada kepolisian jika dibutuhkan. Sejak awal Februari, aparat Kejati memang sudah mengusut mengenai dana Pemkot Semarang itu. Bahkan, Kejati juga sudah meminta keterangan setidaknya sepu-

luh orang. Salah satunya adalah DAK, mantan pegawai BTPN yang diduga mengetahui persoalan uang kas daerah pemkot itu. Kejati pun merasa data sudah mulai lengkap dan siap untuk menaikkan status perkara ke tahap penyidikan. "Tetapi, yang merasa dirugikan sudah melapor ke polisi," ujar dia.

Dari proses penyidikan ini, Hartadi mengatakan, dana yang diduga hilang itu merupakan uang negara. Sehingga, kata dia, apabila ada pelanggaran yang terjadi, bisa masuk dalam ranah pidana korupsi. Polrestabes Semarang pun sudah mencium dugaan tindak pidana rasuah. Selain itu, ada juga dugaan kejahatan perbankan. Karena itu kemudian keluar surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) atas kasus tersebut.

Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Djihartono sebelumnya mengatakan, jajarannya mendalami kasus tersebut setelah mendapat laporan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPK-AD) Kota Semarang. Menurut dia, ada beberapa bukti berupa dokumen yang diduga dipalsukan ter-

kait kasus tersebut. "Siapa tersangka di balik raibnya uang rakyat tersebut, akan ditentukan dalam penyidikan ini," kata Djihartono.

Pemkot Semarang memang mengambil langkah pidana dan perdata terkait ketidakjelasan duit kas daerah miliaran rupiah itu. Pemkot mengklaim dana kas itu masuk rekening deposito BTPN. Sementara pihak BTPN merasa tidak pernah mengeluarkan dokumen deposito terkait dana kas daerah pemkot. BTPN menyatakan ini setelah melakukan audit investigasi internal.

Dalam rilisnya, Head Corporate Communication BTPN Eny Yulianti mengatakan, hasil audit menunjukkan tidak ada dana yang diklaim pemkot dalam pencatatan banknya. BTPN pun menyebut tidak mengeluarkan dokumen deposito terkait dana yang dipegang Pemkot Semarang. Karena itu, BTPN pun membuat laporan ke Polda Jawa Tengah pada Januari lalu. Eny menyatakan, BTPN akan mendukung proses hukum yang berjalan.

■ antara ed: irfan fitrat